

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Periode 1965-1968, memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah bangsa ini pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa itu ditandai dengan adanya transisi kekuasaan yang pertama, yaitu ketika Soekarno dipaksa menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada pihak militer dibawah Jendral Soeharto. Pada masa itulah sistem Demokrasi Terpimpin jatuh dan terjadi proses pembentukan pemerintahan Orde Baru, yaitu ketika kekuasaan dan otoritas kenegaraan berada di genggaman militer Angkatan Bersenjata dibawah pimpinan Soeharto.¹

Pemulihan keadaan sosial politik di Indonesia yang dilakukan oleh Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dibawah Jendral Soeharto pasca peristiwa 30 September-1 Oktober 1965, menegaskan kepada masyarakat wajah militer yang dominan pada pemerintahan Orde Baru. Langkah awal yang dilakukan oleh Soeharto untuk berada di tampuk kepemimpinan Orde Baru mula-mula ditempuh melalui Sidang Umum MPR 1967. Pada Sidang Istimewa itu, Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Bung Karno. Kemudian MPRS mengadakan sidang lagi pada tanggal 27 Maret 1968, dan secara *de facto* Soeharto resmi ditunjuk sebagai Presiden dengan masa jabatan lima tahun.²

Wacana politik Orde Baru, diciptakan dengan menarik garis batas yang jelas dari era Orde Lama di bawah Soekarno. Orde baru menyusun dan membangun jati dirinya dengan jalan mencitrakan dirinya berbeda dengan era sebelumnya yang buruk. Legitimasi Orde Baru dibangun dari

¹ Julie Southwood & Patrick Flanagan, *Teror Orde Baru: Penyelewengan Hukum & Propaganda 1965-1981*, (Depok: Komunitas Bambu, 2013), 3.

² Dwi Wahyono Hadi & Gayung Kasuma, *Propaganda Orde Baru 1960-1980*. http://journal.unair.ac.id/filerPDF/4_jurnal%20propaganda_dwiwahyonohadi.pdf (diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 13.47)

keberhasilannya dalam menumpas komunisme. Hegemoni sistem pemerintahan Orde Baru karenanya dibangun diatas perannya sebagai pemulih ketertiban umum. Pembunuhan massal dalam skala besar pada tahun 1965-1966 justru dimanfaatkan untuk menanamkan ke dalam benak masyarakat sebuah citra politik bahwa masa pemerintahan Soekarno adalah periode penuh *chaos* dan kekacauan. Dengan kata lain, Orde Baru memanfaatkan kenangan historis itu sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan memapankan legitimasinya.³

Periode 1965-1975 mengundang beragam pendapat dari berbagai pengamat dalam dan luar negeri. Sayap kanan memuji pemerintahan Orde Baru karena mampu membasmi PKI dan mengadopsi kebijakan yang pro-Barat. Sebaliknya, sayap kiri mencibirnya karena kedua kebijakan tersebut. Di antara para pengamat yang kurang memihak, terdapat banyak pengamat yang disamping memuji prestasi pemerintahan Soeharto dalam menyeimbangkan ekonomi, juga mengutuk catatan buruk hak asasi manusia dan korupsi pemerintah tersebut.⁴

Pada kurun waktu 1966-1980 dapat dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi pemerintahan Orde Baru dan Soeharto, sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soekarno. Kemunculan sosok Jendral Soeharto yang bahkan sebelumnya kurang dikenal, menjadikan Soeharto melakukan berbagai upaya dalam rangka membentuk legitimasi kekuasaan. Salah satu upaya Soeharto dalam membentuk legitimasinya adalah melalui jalan pemulihan ekonomi. Soeharto dinilai berhasil memulihkan perekonomian dengan mengubah laju pertumbuhan yang negatif dan laju inflasi melalui program rehabilitasi beberapa tahun.⁵

Pada tahun 1969 bisa dikatakan sebagai masa akhir transisi dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru, inflasi pada akhirnya benar-benar

³ Eriyanto, *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni: Studi atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*, (Yogyakarta: INSIST, 2000), 66.

⁴ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern, 1200-2008*, ed. Moh Sidik Nugraha, Cetakan 3. (Jakarta: Serambi, 2010), 558.

⁵ Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*, (Jakarta: Kompas, 2014), 122.

dapat dikendalikan pemerintah Orde Baru. Kemudian pada 1 April 1969, pemerintah mengalihkan perhatian utamanya dari stabilisasi ekonomi menuju pembangunan dengan menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) untuk periode 1969-1974.⁶

Demi melanggengkan kekuasaannya, Soeharto menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik dengan dukungan militer dan birokrasi. Pada pemilu pertama di era Orde Baru tahun 1971, Ali Murtopo, Amir Mahmud (Menteri Dalam Negeri yang bertanggung jawab mengurus birokrasi), dan Kopkamtib ditugaskan memastikan kemenangan Golkar dalam pemilihan umum. Para perwira militer dan pejabat-pejabat yang turun ke desa diwajibkan menarik suara dalam jumlah yang sudah ditentukan. Intimidasi disebarluaskan untuk memenangkan Golkar sebagai partai politik yang mengusung petahana. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemenangan Golkar pada Pemilu Juli 1971 dengan memperoleh 62,8% suara, memenangkan 236 (65,6%) dari 360 kursi yang diperebutkan.⁷ Hal ini mencoreng catatan demokrasi sebagai pemilu curang pertama dalam sejarah Indonesia.

Tidak berhenti pada cawe-cawe birokrasi dan militer pada pemilu-pemilu, pemerintah Orde Baru juga berupaya meredam kekuatan politik di Indonesia dengan melakukan pembonsaian politik berupa fusi partai. Fusi partai pertama kali pada bulan Januari 1973, pemerintah mendesak beberapa partai politik untuk melebur ke dalam dua partai. Partai-partai Islam, terutama dari NU dan Parmusi melebur kedalam partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dari partai-partai non-Islam (Murba, PNI, Katolik, Kristen, dan IPKI kecil) melebur kedalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Kemudian pada bulan Maret 1973, MPR yang baru terbentuk bersidang dan kembali memilih Soeharto sebagai presiden untuk kedua kalinya.

Kekuasaan Orde Baru yang berorientasi pada pembangunan dan

⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern, 1200-2008*, ed. Moh Sidik Nugraha, Cetakan 3. (Jakarta: Serambi, 2010), 582.

⁷ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia modern, 1200-2008*, ed. Moh Sidik Nugraha, Cetakan 3. (Jakarta: Serambi, 2010), 585.

militeristik pada kelanjutannya mulai menunjukkan kebobrokan politiknya lewat kasus korupsi dan proyek-proyek mewah yang menguntungkan Soeharto, para cukong, dan kroni-kroninya, sehingga hal ini berakibat pada kecaman masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru. Kritik dan kecaman itu kemudian berkulminasi pada tahun 1974, menjadi sebuah gerakan demonstrasi yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat menuntut pemerintah memperhatikan orang-orang kecil, serta menuduh asisten-asisten pribadi presiden melakukan korupsi dengan berkomplot dengan pengusaha-pengusaha asing. Gerakan ini dilancarkan bersamaan dengan kedatangan PM Jepang, Kakuei Tanaka, ke Jakarta. Gerakan 1974 yang dikenal dengan Malari (Malapetaka Januari) ini diperlakukan dengan tangan besi oleh pemerintah Orde Baru, gerakan ini ditumpas dengan tindakan represi militer oleh pemerintah, para pemimpin gerakan ditangkap dan dipenjara, dituduh komunis dan subversif, dianggap mengganggu stabilitas politik.⁸

Pasca Peristiwa Malari 1974, pemerintah Orde Baru mulai meredam pihak-pihak oposisi yang mencoba kritis terhadap kesewenangan kebijakan politik Orde Baru. Pembungkaman terhadap pihak-pihak oposisi tidak hanya dilakukan lewat represifitas ABRI, Soeharto juga membungkus otoritarianismenya dengan wajah birokratis. Pemerintah kerap mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis.

Dapat disimpulkan, bahwa kontrol politik pemerintah atas masyarakat mulai ketat diberlakukan sejak tahun 1970-an hingga tahun 1998. Pemerintah Orde Baru memiliki wajah amat kentara sebagai rezim yang menganut pembangunan ala barat, paternalistik, otoriter, anti komunis, eksploitasi makna pancasila, dan mencurigai golongan Islam. Untuk menghindari peristiwa serupa Malari 1974, pemerintah pada tahun 1978 melakukan depolitisasi di lingkungan kampus melalui kebijakan

⁸ Arief Budiman & Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan Di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001), xxix.

NKK/BKK.⁹ Kemudian pada tahun 1982 pemerintah memberlakukan kebijakan Dwifungsi ABRI, yang berakibat pada penyalahgunaan kekuasaan politik oleh aparat militer. Pada tahun 1982, seiring upaya pembonsaian kekuatan politik Islam, rezim Orde Baru juga melakukan penumpasan terhadap simbol-simbol keislaman salah satunya lewat keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) berupa SK 052/C/Kep/D.82. tentang pelarangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah.¹⁰

Konsepsi pembangunan Orde Baru yang dihimpun dalam “Trilogi Pembangunan” juga menyebabkan pemerintah gencar melakukan pembangunan diberbagai sektor kehidupan. Pembangunan yang dilakukan rezim Orde Baru kerap tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berakibat pada konflik agraria yang banyak memakan korban ratusan bahkan ribuan masyarakat yang harus tergusur dan tewas ditembak peluru tajam aparat militer. Kasus pelanggaran HAM bermunculan seiring represifitas militer terhadap masyarakat yang menuntut haknya. Kebebasan berekspresi amat dibatasi. Pada tahun 1994, media-media massa terkemuka seperti *Tempo*, *Editor*, dan *Detik* di bredel.¹¹ Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun menjabat sebagai presiden diwarnai dengan berbagai rapor merah catatan demokrasi.

Kondisi sosial politik pada masa pemerintahan Orde Baru, penuh dengan hegemoni rezim dan operasi pemerintah yang dibalut dengan legalisme otokratis. Dominasi ABRI menjadikan maraknya kasus penyelewengan kekuasaan dan kekerasan pemerintah atas masyarakat, kemudian depolitisasi massa juga diberlakukan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, pembangunan yang semena-mena juga memakan

⁹ “Sahabat Daoed Joesoef Jelaskan Kontroversi NKK BKK di Orde Baru” *Tempo*, 24 Januari 2018. <https://nasional.tempo.co/read/1053744/sahabat-daoed-joesoef-jelaskan-kontroversi-nkk-bkk-di-orde-baru> diakses pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 23.55 WIB.

¹⁰ Hendi Jo, *Jilbab Terlarang di Era Orde Baru*. <https://historia.id/kultur/articles/jilbab-terlarang-di-era-orde-baru-6k4Xn/page/1> (diakses pada tanggal 1 Agustus 2024 pukul 18.45)

¹¹ Arief Budiman & Olle Tornquist, *Aktor Demokrasi: Catatan Tentang Gerakan Perlawanan Di Indonesia* (Jakarta: ISAI, 2001), xxxiii.

banyak korban yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ditengah kondisi sosial politik yang di hagemoni rezim militeristik Orde Baru, lahirlah kesadaran dari masyarakat mengenai keharusan akan resistensi demi mengembalikan martabat rakyat. Oleh karena itu, muncullah aktor-aktor individu maupun kelompok yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dengan melakukan perlawanannya terhadap rezim otoriter Orde Baru melalui berbagai medium.

Salah seorang tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dengan berbagai medium perjuangannya di berbagai arena, yaitu Emha Ainun Nadjib. Emha Ainun Nadjib merupakan budayawan, sastrawan, aktivis sosial, intelektual Islam yang lahir di Jombang pada tanggal 27 Mei 1953. Emha dikenal sebagai sosok oposan yang aktif mengkritisi kesewenangan rezim Orde Baru melalui karya-karya sastra, pertunjukan seni, dan ceramah-ceramahnya. Sebagai seorang aktivis sosial, wilayah perjuangan Emha dalam memperjuangkan demokrasi di era Orde Baru juga merambah pada aksi langsung menyentuh akar rumput dengan kapasitasnya sebagai orator, demonstran, dan sebagai pengadvokasi masyarakat tergesur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru tahun 1980-1998. Untuk menempatkan posisi Emha dalam merekonstruksi sejarah manuver politik Emha Ainun Nadjib, penulis menggunakan pendekatan teori politik yang digagas Samuel P. Huntington mengenai “Partisipasi Politik” yang dartikan sebagai kegiatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik yang dilaksanakan oleh masyarakat bisa bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir ataupun spontan, berkelanjutan atau tidak menentu, secara damai atau dengan kekerasan, legal maupun ilegal, serta efektif atau tidak efektif.¹² Huntington menegaskan, bahwa partisipasi politik yang digagasnya hanya berkisar pada kegiatan warga otonom atau non-partisan

¹² Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 3.

yang berada diluar lembaga kekuasaan politik seperti eksekutif, legislatif, dan tidak terafiliasi partai politik manapun.

Meski bukan seorang politisi dalam pengertian konvensional, manuver politik Emha selalu dalam posisi memperjuangkan demokrasi ketika keadaan masyarakat dibatasi kebebasannya. Manuver politik Emha juga kerap memberikan pengaruh signifikan terhadap kesadaran politik di masyarakat. Adapun manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru tahun 1980-1998 termanifestasi lewat perlawanannya terhadap pemerintah Orde Baru melalui berbagai medium. Tidak hanya lewat kerja-kerja kesenian, sebagai sosok yang memiliki kemampuan retorika yang baik, Emha juga turut memberikan kesadaran politik di masyarakat melalui kehadirannya di berbagai forum diskusi, seminar, dan pengajian-pengajian. Emha juga tercatat pernah terlibat dalam beberapa aksi demonstrasi sebagai orator.¹³ Beberapa aksi demonstrasi yang mencatat keterlibatan Emha antara lain; menjadi inisiator demonstrasi anti kekerasan tahun 1980-an, di UGM, dalam aksi demonstrasi yang lain juga Emha mengecam represi militer terhadap masyarakat Nipah yang tergusur tahun 1993.

Dapat dikatakan, Emha memainkan peran penting dalam lanskap politik era Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dalam posisi Emha yang kerap dicurigai dan mendapatkan perlakuan represif dari Rezim Orde Baru. Karena sikapnya yang keras terhadap pemerintah Orde Baru, Emha pernah dilarang masuk wilayah Jawa Tengah karena dianggap mengganggu stabilitas politik nasional. Pada suatu waktu, karya-karya Emha juga pernah dilarang terbit dan dicekal untuk tampil di berbagai forum. Selain sebagai orator dan demonstran, Emha juga melayangkan kritiknya terhadap rezim Orde Baru melalui organisasi ICMI pada tahun 1991. Bahkan, diakhir masa pemerintahan Orde Baru Emha juga terlibat sebagai inisiator Reformasi 1998 dengan menyumbangkan gagasan-gagasannya agar transisi kekuasaan

¹³ “Setelah Mereka Belajar dari Peristiwa Dili” Tempo, 16 Oktober 1993. <https://majalah.tempo.co/read/nasional/4454/setelah-mereka-belajar-dari-peristiwa-dili> diakses pada tanggal 2 Agustus 2024 pukul 21.14 WIB.

dapat berjalan damai.

Periode 1980-1998 dijadikan batasan temporal oleh peneliti dengan alasan beberapa hal; *pertama*, tahun 1969-1975 merupakan periode konsentrasi Emha di bidang kesusastraan terutama puisi dan cerpen. Eksplorasi tema sosial di dalam karya sastra Emha baru dimulai sejak tahun 1979 keatas. Pada masa itu juga bersamaan dengan proses kreatif Emha bersama Kelompok Teater Dinasti yang menggarap naskah dan pentas teater bertema sosial politik. *Kedua*, pada tahun 1980-an Emha mulai mengalami benturan dengan kondisi sosial-politik yang di opresi kala itu. Puisi maupun pentas dramanya selalu tidak pernah berdamai dengan kepentingan stabilitas politik Orde Baru.

Sejalan dengan itu, ekspansi tematik dari karya-karya maupun kiprah sosial Emha semakin berkembang dan memasuki berbagai wilayah kehidupan masyarakat pada saat itu.¹⁴ Kemudian pada tahun 1980, karya-karya Emha dengan tema sosial politik semakin dominan. Hal itu dapat dilihat dari berbagai puisi-puisi protesnya, esai yang menggugat, serta naskah drama yang kontekstual. Tercatat, pada 1982 di *Tempo*, Emha mengkritik *Sastra Bisu* dan beranggapan bahwa sastra mesti bersikap dalam persoalan sosial.¹⁵ Kemudian pada tahun 1984, Emha mengeluarkan kredo keseniannya dalam buku *Sastra Yang Membebaskan* yang berisi prinsip bahwa kesenian harus berperan dalam perubahan sosial, Kemudian disusul dengan pertunjukan fenomenal teater *Lautan Jilbab* (1987) sebagai respon atas pelarangan jilbab bagi kaum muslimah.

Melalui pembahasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa; *pertama*, begitu banyak peran signifikan Emha Ainun Nadjib dalam memperjuangkan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Baru lewat berbagai kritik. Kritik yang dijalankan Emha menapaki amat banyak arena sehingga dalam konteks ini Emha amat mencair menjajaki berbagai wilayah

¹⁴ Toto Rahardjo dalam Ian L. Betts, *Jalan Sunyi Emha* (Jakarta: Kompas, 2006), xxiii.

¹⁵ *Sastra Dewa, Sastra Macan, Sastra Tank.*
<https://majalah.tempo.co/read/kolom/47284/sastra-dewa-sastra-macan-sastra-tank> (diakses pada 2 Agustus 2024 pukul 21.37 WIB)

sosial-politik. Hal ini yang menjadikan Emha kerap dinilai begitu dekat dengan kekuasaan meskipun dikenal sebagai oposan. *Kedua*, historiografi mapan amat jarang mencatat Emha sebagai tokoh yang memiliki banyak peran dalam pergerakan sosial, khususnya dalam konteks era pemerintahan Orde Baru. *Ketiga*, minimnya literatur yang mengkaji mengenai manuver politik Emha Ainun Nadjib khususnya dalam penelitian berbentuk skripsi. Melalui pertimbangan ini, maka penulis tertarik untuk merekonstruksi sejarah manuver politik Emha Ainun Nadjib dalam penelitian berjudul: “Manuver Politik Emha Ainun Nadjib Pada Masa Orde Baru Tahun 1980-1998”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka timbul beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Emha Ainun Nadjib?
2. Bagaimana manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru tahun 1980-1998

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan biografi Emha Ainun Nadjib
2. Untuk menjelaskan manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru tahun 1980-1998

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak akan terjadi pengulangan maupun plagiarisme. Kajian mengenai manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru 1980-1998 beberapa telah diteliti di dalam literatur, untuk itu agar mengetahui perbedaan-perbedaan didalam hasil penelitian yang telah dilakukan dan yang akan peneliti tulis harus dipaparkan

perbedaan demi otentikasi kajian ilmiah. Penulis telah menemukan tinjauan pustaka dari beberapa karya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ilmiah lainnya, untuk pembandingan dan menemukan jati diri perbedaannya diantaranya yaitu:

- a. Tesis Sumasno Hadi Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat tahun 2011 yang berjudul “Pemikiran Emha Ainun Nadjib Dalam Tinjauan Filsafat Humanisme : Kontribusinya Bagi Perkembangan Kehidupan Sosial”. Tesis master yang membahas mengenai pemikiran Emha Ainun Nadjib yang ditinjau dari konsep filsafat humanisme dan pengaruhnya bagi kehidupan sosial di masyarakat.
- b. Skripsi Ikrimah Vella Riyanti Universitas Pendidikan Indonesia Bandung Departemen Pendidikan Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial tahun 2017 yang berjudul “Rekam Jejak Emha Ainun Nadjib Dalam Perkembangan Politik Indonesia (1991-2013)”. Skripsi yang membahas mengenai rekam jejak Emha Ainun Nadjib dalam bingkai politik di Indonesia dari masa Orde Baru sampai Reformasi. Skripsi ini juga membahas mengenai pencekalan-pencekalan yang dialami oleh Emha Ainun Nadjib imbas dari kritiknya terhadap pemerintah Orde Baru. Dalam penelitian ini penulis juga membahas pembaharuan pemikiran Islam Emha Ainun Nadjib.
- c. Jurnal Lina Meilinawati Rahayu, dan Aquarini Priyatna Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjajaran Bandung yang berjudul “Resistensi Rezim Represif: Telaah atas *Opera Kecoa* Karya Riantriarno dan *Perahu Retak* Karya Emha Ainun Nadjib” pada jurnal *Lensa: Kajian Kebahasaan, Kesusastraan, dan Budaya* Vol. 9 No 2 Desember 2019. Membahas mengenai drama sebagai media untuk resistensi dan perlawanan terhadap struktur kekuasaan yang mapan pada saat itu rezim Orde Baru. Upaya resistensi itu

dilakukan Emha Ainun Nadjib lewat drama *Perahu Retak* sebagai bagian dari penyadaran bahwa sebenarnya masyarakat sedang diopresi tanpa disadari.

Perbedaan kedua penelitian diatas dengan penelitian ini adalah dari beberapa aspek sebagai berikut; fokus penelitian, metode, serta pendekatan yang dilakukan. Penelitian ini berfokus pada sejarah secara kronologis bagaimana manuver politik Emha Ainun Nadjib pada masa Orde Baru 1980-1998 sebagai aktor non-partisan yang aktifitas sosialnya memiliki imbas politik yang signifikan pada masa pemerintahan Orde Baru khususnya tahun 1980-1998 ketika kondisi sosial-politik di masyarakat yang jauh dari nilai-nilai demokratis. Manuver politik Emha Ainun Nadjib yang tercermin lewat kritik-kritik di berbagai karyanya serta melalui langkah konkret keterlibatan Emha Ainun Nadjib sebagai orator, demonstran, dan inisiator Reformasi 1998. Pembahasan tersebut yang menjadikan penelitian ini berbeda dari literatur sebelumnya yang sudah disebutkan diatas.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentu saja memakai metode yang sesuai dengan sistematika yang dipelajari, yaitu Metode Penelitian Sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang tergolong “metode historis”, yaitu metode penelitian yang khusus digunakan dalam penelitian sejarah melalui tahapan tertentu. Ada 4 tahap yang harus dilakukan ketika melakukan penelitian sejarah, yaitu Heuristik, Verifikasi (kritik), Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik

Heuristik adalah tahap pertama dalam sebuah penelitian sejarah. Heuristik merupakan suatu aktivitas pencarian dan pengumpulan sumber penelitian yang akan diteliti. Sumber penelitian bisa berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber sejarah dibagi

menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dan mengumpulkan sumber yang terdapat di perpustakaan, perpustakaan online, digital google book, dan internet. Untuk itu pengumpulan sumber sebagai berikut:

a. Sumber Primer

- a) Emha Ainun Nadjib. 1984. *Sastra Yang Membebaskan: Sikap Terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia*. Yogyakarta: LP2M.
- b) Emha Ainun Nadjib. 1985. *Dari Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan*. Bandung: Mizan.
- c) Emha Ainun Nadjib. 1995. *Gelandangan Dikampung Sendiri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- d) Emha Ainun Nadjib. 1998. *Iblis Nusantara Dajjal Dunia: Asal-Usul Krisis Kita Semua*. Yogyakarta: Zaituna.
- e) Emha Ainun Nadjib. 1998. *Mati Ketawa Cara Refotnasi*. Yogyakarta: Zaituna.
- f) Emha Ainun Nadjib. 1998. *Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam Di Istana*. Bandung: PT Mizan pustaka
- g) Emha Ainun Nadjib. 1999. *Ziarah Pemilu, Ziarah Politik, Ziarah Kebangsaan*. Yogyakarta: Zaituna.
- h) Emha Ainun Nadjib. 1996. *Surat Kepada Kanjeng Nabi*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- i) Forum. *Tuhan Saja Tak Melarang Orang Bicara*. No. 6 Tahun IV. (3 Juli 1995).
- j) Panji Masyarakat. *Emha, Blak-Blakan*. No. 696 Tahun XXXIV (21 September – 1 Oktober 1991)
- k) Humor. *Emha Ainun Nadjib: Saya Memang Jago*. No. 26. (23 Oktober – 12 November 1991)

- l) Matra. *Emha Ainun Nadjib: Kiai Mbeling Dari Jombang*. (Februari 1992)
- m) Tiras. *Hantu PKI Di Sekitar Mega*. No. 2 Tahun I. (9 Februari 1995)
- n) Ummat. *Dibalik Jabat Tangan Pak Harto-Gus Dur*. No. 11 Tahun II. (25 November 1996)
- o) Sinar. *Emha Ditengah Konflik Politik*. No. 23 Tahun IV. (1 Maret 1997).
- p) Gatra. *Manuver dan Politik Emha*. No. 16 Tahun II. (2 Maret 1996).
- q) Gatra. *Tapos: Membongkar Harta Soeharto*. No. 37 Tahun IV. (1 Agustus 1998).
- r) Gatra. *Cak Nun: Pak Harto Tobatlah*. No. 13 Tahun V. (13 Februari 1999).
- s) Gatra. *Manuver dan Politik Emha*. No.16 Tahun II. (2 Maret 1996).
- t) Garda. *Cak Nun: Soeharto Faktor Kunci*. Vol. 1/05. (15-18 Februari 1999).

b. Sumber Sekunder

- a) Ian L, Betts. 2006. *Jalan Sunyi Emha*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- b) Latief S Nugraha. 2018. *Sepotong Dunia Emha*. Yogyakarta: Octopus.
- c) Jabrohim. 2003. *Tahajjud Cinta Emha Ainun Nadjib: Sebuah Kajian Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- d) Aprinus Salam, M Alfian Alfian, Wawan Susetya. 2014. *Kitab Ketentraman Dari Khasanah Emha Ainun Nadjib*. Bekasi: Penjuru Ilmu.
- e) Sumasno Hadi. *Semesta Emha Ainun Nadjib*. 2017. Bandung: Mizan.

2. Verifikasi (Kritik)

Kritik sumber adalah sebuah aktivitas yang menyangkut verifikasi sumber mengenai kebenaran data atau ketepatan sumber.¹⁶ Dalam tahapan kritik dilakukan dua tahapan yaitu kritik ekstern dan intern yang berfungsi untuk menguji otentisitas, integritas, kredibilitas dan independensi dari sumber.

a. Kritik Eksternal

- a) Buku Emha Ainun Nadjib *Satra yang Membebaskan: Sikap Terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia*. Yogyakarta: LP2M, tahun 1984. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Secara fisik buku utuh tidak ada robekan. Kualitas buku sudah menguning karena terbitan lama.
- b) Buku Emha Ainun Nadjib *Dari Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan*. Bandung: Mizan, tahun 1985. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Secara fisik buku utuh tidak ada robekan. Kualitas buku sudah menguning karena terbitan lama.
- c) Buku Emha Ainun Nadjib *Gelandangan Dikampung Sendiri*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, tahun 1995. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Secara fisik buku utuh tidak ada robekan. Kualitas buku sudah menguning karena terbitan lama.
- d) Buku Emha Ainun Nadjib *Iblis Nusantara Dajjal Dunia: Asal-Usul Krisis Kita Semua*. Yogyakarta: Zaituna,

¹⁶ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, ed. M. Nursam, ke-4 (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2019).

tahun 1998. Merupakan sumber primer yang layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Secara fisik buku tidak utuh pada halaman 1-7, tetapi tidak mengurangi apapun sebab esai pertama dalam buku itu dimulai pada halaman 9. Kualitas buku sudah menguning karena terbitan lama.

- e) Buku Emha Ainun Nadjib *Mati Ketawa Cara Refotnasi*. Yogyakarta: Zaituna, tahun 1998. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Secara fisik buku utuh tidak ada robekan. Kualitas buku sudah menguning karena terbitan lama.
- f) Buku Emha Ainun Nadjib. 1998. *Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam Di Istana*. Bandung: PT Mizan Pustaka. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Buku tersedia dalam bentuk fisik, tulisan terbaca dengan baik serta halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- g) Buku Emha Ainun Nadjib *Ziarah Pemilu, Ziarah Politik, ZiarahKebangsaan*. Yogyakarta: Zaituna, tahun 1999. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Buku yang didapatkan berbentuk digital, tulisan terbaca dengan baik serta halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- h) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Surat Kepada Kanjeng Nabi*, Bandung: PT Mizan Pustaka edisi kedua tahun 2015. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari pemikiran Emha. Buku asli bukan turunan meskipun untuk percetakannya masuk ke edisi kedua. Buku yang didapatkan berbentuk fisik, kualitas tulisan bisa terbaca

dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.

- i) Majalah *Forum*. Berjudul *Tuhan Saja Tak Melarang Orang Bicara*. No. 6 Tahun IV. (3 Juli 1995). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena merupakan hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- j) Majalah *Panji Masyarakat*. Berjudul *Emha, Blak-Blakan*. No. 696 Tahun XXXIV (21 September – 1 Oktober 1991). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- k) Majalah *Humor*. Berjudul *Emha Ainun Nadjib: Saya Memang Jago*. No. 26. (23 Oktober – 12 November 1991). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- l) Majalah *Matra*. Berjudul *Emha Ainun Nadjib: Kiai Mbeling Dari Jombang*. (Februari 1992). Merupakan

sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.

- m) Majalah *Tiras*. Berjudul *Hantu PKI Di Sekitar Mega*. No. 2 Tahun I. (9 Februari 1995). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- n) Majalah *Ummat*. *Dibalik Jabat Tangan Pak Harto-Gus Dur*. No. 11 Tahun II. (25 November 1996). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil pemikiran Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- o) Majalah *Sinar* No. 23 Tahun IV, 1 Maret 1997 berjudul *Emha Ditengah Konflik Politik*. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena bersal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- p) Majalah *Forum* No. No. 6 Tahun IV, 3 Juli 1995

berjudul *Emha: Tuhan Saja Tak Melarang Orang Bicara*. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena merupakan hasil pemikiran Emha Ainun Nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk digital dengan kualitas majalah sudah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas.

- q) Majalah *Gatra*. Berjudul *Tapos: Membongkar Harta Soeharto*. No. 37 Tahun IV. (1 Agustus 1998). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- r) Majalah *Gatra*. Berjudul *Cak Nun: Pak Harto Tobatlah*. No. 13 Tahun V. (13 Februari 1999). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena berasal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap tidak ada yang hilang.
- s) Majalah *Gatra* No.16 Tahun II/2 Maret 1996 berjudul *Manuver dan Politik Emha*. Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena bersal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas, dan halaman lengkap

tidak ada yang hilang.

- t) Majalah *Garda* Berjudul *Cak Nun: Soeharto Faktor Kunci*. Vol. 1/05. (15-18 Februari 1999). Merupakan sumber primer dan layak dijadikan sebagai sumber karena bersal dari hasil wawancara dengan Emha Ainun nadjib. Majalah asli bukan turunan, majalah berbentuk fisik dengan kualitas majalah menguning karena cetakan lama, tetapi tulisan bisa terbaca dengan jelas.

b. Kritik Internal

- a) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Sastra yang Membebaskan: Sikap Terhadap Struktur dan Anutan Seni Modern Indonesia*, Yogyakarta: LP2M, tahun 1984. Dari segi isi buku ini membahas kumpulan kekusaran, perjuangan, dan kritik Emha di dunia sastra. Emha menyebutkan agar tak menilai karya sastra dari segi keestetikaan belaka, seharusnya mampu melihat kesenian dalam kanvas kehidupan bukan hanya kanvas kesenian. Buku ini berisi credo kesenian dan kesusastraan Emha yang menjadi landasan berfikir Emha dalam berkarya. Buku ini sebagai analisis penulis untuk memahami pemikiran Emha dari aspek lainnya.
- b) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Dari Pojok Sejarah: Renungan Perjalanan*, Bandung: Mizan, tahun 1985. Dari segi isi buku ini membahas tentang berisi kumpulan renungan perjalanan kehidupan Emha tahun 80-an. Disebut sebagai sketsa-sketsa kecil parsial, wujud dalam upaya mementaskan permasalahan nasional yang terjadi pada bangsa ini. Isi buku ini awalnya berupa kumpulan Essai yang berbentuk surat yang ditujukan kepada seorang adik Emha mengenai sudut pandang Emha perihal permasalahan sosial di Indonesia. Buku ini

- sebagai analisis penulis untuk memahami pemikiran Emha dari aspek lainnya.
- c) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Gelandangan Dikampung Sendiri*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, tahun 1995. Dari segi isi membahas tentang tatanan dunia yang dibolak balik. Mengenai para pejabat yang menyangka bahwa mereka adalah atasan rakyat, mereka merasa tinggi dan rakyat rendah. Buku ini sebagai analisis penulis untuk memahami pemikiran Emha dari aspek lainnya.
- d) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Iblis Nusantara Dajjal Dunia: Asal-Usul Krisis Kita Semua*, Yogyakarta: Zaituna, tahun 1998. Dari segi isi merupakan kumpulan esai Emha sepanjang 1997 di dalam majalah Adil. Kumpulan esai ini berisi pemikiran politik dan memoar politik Emha sepanjang tahun 1997.
- e) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Mati Ketawa Cara Refotnasi*, Yogyakarta: Zaituna, tahun 1998. Dari segi isi membahas tentang permasalahan- permasalahan sosial, politik, dan lainnya pada masa reformasi. Buku ini sebagai tinjauan umum analisis penulis untuk memahami pemikiran Emha dari aspek lainnya.
- f) Buku Emha Ainun Nadjib. 1998. *Saat-Saat Terakhir Bersama Soeharto: 2,5 Jam Di Istana*. Bandung: PT Mizan Pustaka. Dari segi isi membahas tentang memoar Emha Ainun Nadjib sebagai saksi sejarah keterlibatannya dalam pusaran peristiwa Reformasi 1998. Di dalam buku ini menceritakan kesaksiannya pada saat-saat terakhir pemerintahan Orde Baru. Pada saat itu Emha melakukan diskusi bersama Presiden

Soeharto membicarakan agar proses peralihan kepemimpinan berjalan dengan damai.

- g) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Ziarah Pemilu, Ziarah Politik, Ziarah Kebangsaan*. Yogyakarta: Zaituna, tahun 1999. Dari segi isi membahas tentang ajakan untuk berziarah, mengunjungi fenomena sosial/politik masa lalu, masa kini, dan 'menjelajah' cakrawala masa depan. Merenungkan apa yang telah, sedang, dan mesti dikerjakan hari esok sebagai sebuah bangsa.
- h) Buku Emha Ainun Nadjib berjudul *Surat Kepada Kanjeng Nabi*, Bandung: Penerbit Mizan, Cet I 1996. Dari segi isi membahas mengenai fenomena sosial budaya yang ada di masyarakat. Meskipun tidak semua isi buku secara keseluruhan membahas hal tersebut.
- i) Majalah *Forum* No. . No. 6 Tahun IV, 3 Juli 1995 berjudul *Emha: Tuhan Saja Tak Melarang Orang Bicara*. Berisi wawancara terhadap Emha mengenai sosoknya sebagai oposisi dalam konteks saat itu Emha mengeluarkan *Wasiat Muahharram*.
- j) Majalah *Panji Masyarakat*. Berjudul *Emha, Blak-Blakan*. No. 696 Tahun XXXIV (21 September – 1 Oktober 1991). Berisi laporan *Panji Masyarakat* yang membahas arena sosial Emha yang luas, mulai dari perannya dalam mengadvokasi masyarakat Kedungombo, pencekalan Emha di Jawa Tengah, pengunduran dirinya dari organisasi ICMI, dan juga kegiatan sosialnya yang begitu banyak sehingga Emha mengemban banyak sekali predikat seperti, sastrawan, budayawan, Kiai Mbeling, dan juga aktivis sosial.
- k) Humor. Emha Ainun Nadjib: *Saya Memang Jago*. No.

26. (23 Oktober – 12 November 1991). Berisi wawancara terhadap Emha mengenai sosoknya Emha mengenai kepribadian, dan juga pendapat-pendapat Emha seputar persoalan politik, sosial, dan juga selera humor.
- l) Majalah *Matra*. Berjudul *Emha Ainun Nadjib: Kiai Mbeling Dari Jombang*. (Februari 1992). Berisi wawancara terhadap Emha mengenai sosoknya yang di juluki *Ontoseno*, karena rajin memprotes berbagai kemapanan. Juga membicarakan Emha sikap kebudayaan Emha, pemikirannya di bidang keislaman, politik, pentas *Lautan Jilbab*, dan juga pandangannya terhadap demokrasi di Indonesia.
- m) Majalah *Tiras*. Berjudul *Hantu PKI Di Sekitar Mega*. No. 2 Tahun I. (9 Februari 1995). Berisi artikel yang berbentuk esai Emha Ainun Nadjib dengan judul *Kafir Politi*, yang secara keseluruhan berisi tentang subjektivisme negara. Negara menurut Emha berpotensi menuding seseorang dengan klaim yang buruk seolah-olah dapat membahayakan negara hanya karena perbedaan pendapat politik dan mengganggu agenda kotor pemerintah.
- n) Majalah *Ummat*. *Dibalik Jabat Tangan Pak Harto-Gus Dur*. No. 11 Tahun II. (25 November 1996). Berisi mengenai reportasi peluncuran album *Kado Muhammad* karya Emha. Melalui media seni musik Emha menyelipkan pesan-pesan kritik sosial yang menarik.
- o) Majalah *Sinar* No. 23 Tahun IV, 1 Maret 1997 berjudul *Emha Ditengah Konflik Politik*. Berisi wawancara terhadap Emha yang dianggap sebagai juru damai

- ditengah kekisruhan sosial politik pada waktu itu.
- p) Majalah *Gatra* No.16 Tahun II/2 Maret 1996 berjudul *Manuver dan Politik Emha*. Berisi wawancara terhadap Emha mengenai sosoknya yang diperebutkan di panggung politik Indonesia.
 - q) Majalah *Gatra*. Berjudul *Tapos: Membongkar Harta Soeharto*. No. 37 Tahun IV. (1 Agustus 1998). Berisi artikel berbentuk esai karya Emha berjudul *Wanted: Supermen*, yang berisi pendapat Emha mengenai kondisi sosial-politik yang tidak kondusif. Di artikel itu juga menyebut peran Emha yang berkeliling mengedukasi masyarakat di berbagai daerah.
 - r) Majalah *Gatra*. Berjudul *Cak Nun: Pak Harto Tobatlah*. No. 13 Tahun V. (13 Februari 1999). Berisi reportase dan wawancara dengan Emha mengenai manuver politiknya berupa kunjungannya ke Cendana untuk mengajak Soeharto untuk tampil dalam acara “*Ikrar Husnul Khatimah*”. Sebuah acara pertobatan Soeharto atas dosa-dosa politiknya dimasa lalu.
 - s) Majalah *Gatra* No.16 Tahun II/2 Maret 1996 berjudul *Manuver dan Politik Emha*. Berisi wawancara terhadap Emha mengenai sosoknya yang menjadi bagian dari fenomena. Dalam wawancara ini juga menyebutkan perihal berbagai pandangan Emha mengenai politik, Soeharto, Gus Dur, dan partai Islam.
 - t) Majalah *Garda* Berjudul *Cak Nun: Soeharto Faktor Kunci*. Vol. 1/05. (15-28 Februari 1999). Berisi pandangan Emha mengenai sosok Soeharto sebagai faktor kunci penyelamatan bangsa dari bencana perpecahan.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah tahapan menafsirkan fakta sejarah yang saling berhubungan berdasarkan data yang telah melewati proses heuristik dan kritik dalam sebuah metodologi penelitian sejarah. Kuntowijoyo menjelaskan, dalam merekonstruksi fakta sejarah, sejarawan membutuhkan pendekatan ilmu sosial dan analitik, dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial yang relevan untuk menjelaskan kejadian-kejadian historis.¹⁷ Dalam menginterpretasikan fakta sejarah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Thomas Carlyle mengenai Manusia Besar (*The Great Man Theory*), dan teori Partisipasi Politik yang digagas oleh Samuel P. Huntington.

Gagasan yang terkenal dari Thomas Carlyle tentang manusia besar (*The Great Man*) menyatakan bahwa seluruh gerak sejarah dimainkan oleh manusia besar, pemimpin, dan tokoh. Dalam buku *On Heroes, Hero-Worship, and The Heroic in History*, Carlyle menganalisis pengaruh orang-orang besar dalam sejarah seperti para nabi, kaisar, intelektual, sastrawan, dan tokoh-tokoh terkemuka lain, terkait pengaruhnya di tengah masyarakat beserta faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilannya.¹⁸ Dalam penelitian ini dapat dikatakan, Emha merupakan manusia besar yang memperjuangkan nilai-nilai demokrasi pada saat kondisi sosial-politik tidak stabil di era Orde Baru tahun 1980-1998. Hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan Emha dalam membentuk jiwa zaman (*Zeitgeist*) yaitu pemikiran-pemikiran Emha berupa kritik yang dituangkan dalam berbagai manuver politiknya mampu mempengaruhi perilaku masyarakat saat itu. Contoh kecil dalam hal ini dapat dilihat dalam kritik Emha terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pelarangan jilbab yang direspon dengan pementasan drama kolosal *Lautan Jilbab* (1988), pementasan ini memberikan pengaruh semakin massifnya penggunaan jilbab bagi kaum

¹⁷ Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), 7.

¹⁸ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, dan Kritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 83.

muslimah di Indonesia.

Sementara, Samuel P. Huntington mengemukakan konstruksi pengertian Partisipasi Politik berupa kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik yang dilaksanakan oleh masyarakat dapat bersifat individual ataupun kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau tidak menentu, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, serta efektif atau tidak efektif.¹⁹ Melalui teori ini dapat diartikan bahwa makna manuver politik tidak hanya bisa dilakukan oleh individu-individu yang berada didalam kekuasaan dan partai politik belaka, tetapi oleh setiap masyarakat warga negara. Oleh karena itu melalui teori ini, akan lebih rasional dan sistematis bagi peneliti untuk membahas mengenai manuver politik Emha sebagai individu masyarakat non-partisan yang memiliki manuver politik melalui berbagai medium dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi di Indonesia pada masa pemerintahan otoriter Orde Baru, khususnya pada periode 1980-1998 dimana kontrol politik rezim atas masyarakat amat ketat diberlakukan,

4. Historiografi

Tahap akhir setelah melakukan proses heuristik, kritik, dan menemukan interpretasi dari fakta sejarah, maka tahapan selanjutnya adalah penulisan atau historiografi.²⁰ Historiografi merupakan suatu proses penyusunan fakta sejarah berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah, dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.

¹⁹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, (Cambridge: Harvard University Press, 1977), 3.

²⁰ Ajid Thohir dan Ahmad Sahidin, *Filsafat Sejarah Profetik, Spekulatif, dan Kritis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 148.

Pada tahapan historiografi, peneliti memberikan jawaban dan penjelasan terkait rumusan masalah yang diajukan. Dalam tahapan ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analitis. Untuk mencapai format penulisan skripsi yang sistematis, pada tahapan ini penulis menyusunnya ke dalam empat bagian.

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperjelas masalah-masalah yang ada maka dibuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai pembahas masalah. Kemudian dikemukakan tujuan penelitian yang bermaksud untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah. Pada bagian akhir, dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian sejarah.

Bab II Merupakan Bagian yang menjelaskan Biografi beserta latang belakang kehidupan Emha Ainun Nadjib beserta karya-karya nya yang terdiri dari berbagai macam mulai dari Esai, Kumpulan Puisi, Naskah Drama, dan Karya Musik.

Bab III Merupakan Bagian yang menguraikan pembahasan yang berisi tentang Manuver Politik Emha Ainun Nadjib Pada Masa Orde Baru Tahun 1980-1998. Yang terdiri dari kritik-kritik di dalam karyanya terhadap rezim Orde Baru. Serta pergerakannya Sebagai Sastrawan dan Budayawan, Sebagai Penceramah dan Orator, Sebagai Demontran, Sebagai Anggota ICMI, dan Sebagai Inisiator gerakan Reformasi 1998.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Manuver Politik Emha Ainun Nadjib Pada Masa Orde Baru Tahun 1980-1998 dan saan. Kemudian selanjutnya disusul dengan Daftar Isi dan Daftar Lampiran.